PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Nama : Abel Rinaldi
NIM : 22 2011 323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Abel Rinaldi
NIM : 22 2011 323

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abel Rinaldi

Nim : 22 2011 323

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, 2017

Yang membuat pernyataan,

Abel Rinaldi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan**

Nama : **Abel rinaldi**
Nim : **22 2011 323**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal,

Pembimbing

(Drs. Sunardi, S.E, M.Si)
NIDN/NBM : 0206046303/784021

Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

(Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si,Ak.,CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Memulai Dengan Penuh Keyakinan

Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan

Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan

(Abel Rinaldi)

Ku persembahkan kepada :

- *Ayah (Marfin Effendi) dan Ibu (Lainah) tercinta*
- *Ayuk, Kakak dan Adik tersayang*
- *Sahabat-sahabatku (Abdul Dinata, Rinto Gumay ,Mewa Oka Rinaldo, Maria Reka Novianti, Reni Harahap)*
- *Teman-teman UMP seperjuangan (Arya J.P, Fadel M. Muhako, Heru Cipta Wijaya, Robby Afrizal, Wahyu Hary Wibowo, dll)*
- *Almamater tercinta*

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan**".

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si., yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan memberikan motivasi kepada penulis tentang arti kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. H Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si,Ak.,CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmunya baik praktik maupun teori selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kantor Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)
7. Teman – teman Seperjuangan FEB-UMP 2011

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 MARET 2017

Penulis

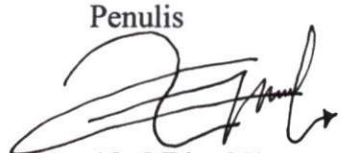

Abel Rinaldi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI vii

HALAMAN DAFTAR TABEL xi

HALAMAN DAFTAR GAMBAR xii

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Landasan Teori 11

1. Pengertian otonomi daerah 10

2. Anggaran pendaptan dan belanja daerah 12

3. Pendapatan asli daerah 13

4. Dana perimbangan 17

5. Belanja modal 25

C. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal 28

D. Hipotesis 31

E. Kerangka Teori 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32

B. Tempat Penelitian 33

C. Operasionalisasi Variabel 33

D. Populasi dan Sampel 34

E. Data Yang Diperlukan 35

F. Metode Pengumpulan Data 35

G. Analisis Data dan Teknik Analisis 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum 43

a. Sejarah Provinsi Sumatera Selatan 43

b. Visi dan Misi 44

c. Tugas dan Fungsi 45

2. Gambaran umum Provinsi Sumatera Selatan 46

a. Kondisi Geografis 46

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 48

c. Data 49

B. Pembahasan Hasil Penelitian 63

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 67

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Data Pendapatan PT. Pos Indonesia (Persero)	5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	10
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	33
Tabel III.2	Populasi	34
Tabel IV.1	Data PAD T.A 2013-2015	50
Tabel IV.2	Data DP T.A 2013-2015	52
Tabel IV.3	Data BM T.A 2013-2015	53
Tabel IV.4	Uji Multikolinearitas	55
Tabel IV.5	Uji Autokorelasi	57
Tabel IV.6	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	59
Tabel IV.7	Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel IV.8	Hasil Uji F	61
Tabel IV.9	Hasil Uji t	62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Teori 31

Gambar IV.1 Uji Normalis 54

Gambar IV.2 Uji Heteroskedastisitas 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fotokopi Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

Lampiran 2 : Fotokopi Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Fotokopi Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian

Lampiran 3 : Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an

Lampiran 4 : Fotokopi Sertifikat TOEFL

Lampiran 5 : Fotokopi Sertifikat KKN

Lampiran 6 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Abel Rinaldi/222011323/2017/ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan dari latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan secara simultan maupun parsial ? Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan secara simultan maupun parsial. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melauli web. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian ini yaitu menunjukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara persial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

ABSTRACT

Abel Rinaldi/222011323/2017/ Original Influence Earnings of Area And Fund Counter Balance To Expense Capital In Government Town And Sub-Province Provinsi South Sumatra.

Pursuant to from background hence this research internal issue formula is how level of Original Earnings influence of Area And Fund Counter balance to Expense Capital in Government Town and Sub-Province Provinsi South Sumatra by simultan and also parsial ? Target of Research Pursuant to from formula of[is problem of, hence target of this research is to know Original Earnings influence of Area And Fund Counter balance to Expense Capital in Government Town and Sub-Province Provinsi South Sumatra by simultan and also parsial. this Research type is research of asosiatif. This research is done/conducted by at Monetary Directorate General Counter balance office of web melauli. Variable in this research is Original Earnings of Area, Fund Counter balance and Expense Capital. used by Data is sekunder data with data collecting technique in this research is documentation. used by Analysis technique is quantitative analysis.

Result of this research that is menunjukan that by simultan Original Earnings of Fund Counter balance and area have an effect on to Expense Capital. By persial Original Earnings of Area have an effect on to Expense Capital and Fund Counter balance Have an effect on to Expense Capital.

Keyword : Original Earnings of Area, Fund Counter balance, Expense Capital.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang- undang no 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Pola hubungan yang cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur daerahnya.

Kebijakan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi dalam negeri yang menunjukan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengidendikasi semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat dari tiap negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing-masing.

Pemerintah daerah sekarang semenjak adanya otonomi daerah sudah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya sendiri. Peningkatan hak dalam pengolahan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahanya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program yang dijalankanya. Karena peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerahkarena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kesumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatanya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002: 132) "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003). Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah harus mengalami perubahan, bila sebelumnya lebih banyak digunakan dalam pos belanja aparatur, maka jika ingin meningkatkan pelayanan publik haruslah lebih memprioritaskan alokasi belanja modal.

Perubahan alokasi belanja ini juga bertujuan agar ada peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi daerah. Untuk meningkatkan pelayanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002) dalam Fhimi (2009) yang menyatakan dalam otonomi daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri pada pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk peningkatan

fasilitas pelayanan publik. Oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hasil dari penelitian sebelumnya pada Maria reka Novianti (2013) membahas bagaimana besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintahan Kota Bandung. Dan Ariv Cahyono (2010) membahas tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal secara parsial dan simultan.

Tabel I.1
APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 – 2015

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
2013	2.287.016	2.644.843	1.099.140
2014	2.482.129	3.841.412	922.247
2015	2.784.967	3.262.707	1.676.693

Sumber : laporan APBD Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Tabel diatas menunjukkan hasil dari total Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 – 2015. Dari data tersebut apakah terdapat pengaruh dari hasil Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Maka, dengan adanya data tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana besarnya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana besarnya pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka peneliti ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan dan wawasan penulis berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

   Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga sebagai masukan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan kedepannya.

3. Bagi Almamater

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan guna penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ariv Cahyono (2010) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara parsial dan simultan ?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal secara parsial dan simultan. Metode penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi dengan menggumpulkan data, jurnal dan artikel orang lain.

Hasil penelitian menunjukan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Cherrya Dhia (2012) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kanupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapatan

asli daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Metode penelitian ini menggunakan domentasi dengan cara mengumpulkan data – data dan jurnal orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Secara parsial hanya lain – lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan, sedangkan yang lain- lainnya tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan.

Maria Reka Novianti (2013) meneliti dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintahan kota Bandung. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah kota Bandung ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dan perimbangan terhadap belanja modal. Metode yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi dengan cara menggunakan data dan jurnal orang lain.

Hasil penelitian ini menunjukan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintahan kota Bandung tidak berpengaruh secara parsial. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana

perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal di pemerintahan kota Bandung.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Ariv Cahyono (2010) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal	Hasil penelitian menunjukan secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Perbedaan terdapat pada objek penelitian.
2	Cherrya Dhia (2012) dengan judul analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kanupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan maupun parsial mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan.	Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan. Secara parsial hanya lain – lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan, sedangkan yang lain- lainnya tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama- sama meneliti tentang APBD pemerintah kota dan kabupaten provinsi sumatera selatan. Perbedaan nya terdapat pada variabel penelitian.
3	Maria Reka Novianti (2013) meneliti dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintahan kota bandung	Hasil penelitian ini menunjukan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintahan kota bandung tidak berpengaruh secara parsial. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal di pemerintahan kota bandung.	Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. Perbedaan terdapat pada objek penelitian.

B. Landasan Teori

1) Pengertian Otonomi Daerah

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling memiliki pengetahuan tentang permasalahan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Karena pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang no 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang berisikan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pengertian otonomi daerah dan otonom daerah adalah sebagai berikut :

"otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan".

"daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sebagai aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan pengertian diatas maka dengan otonomi daerah ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengolaan pemerintah daerah. Dengan peningkatan wewenang ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja untuk program kerjanya.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Dalam melaksanakan segala sesuatu perlu melakukan perencanaan yang matang agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktivitas, terlebih bagi aktivitas besar yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan pemerintahan daerah. Diperlukan perencanaan yang matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberi pelayanan maksimat kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang dibuat pemerintah daerah adalah dibuatnya perencanaan APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas,

nyata dan bertanggung jawab. Adapun pengertian anggaran menurut M.Nafarin (2007: 20) :

"anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode".

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam pelaksanaanya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai mana di jelaskan dalam Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (17) :

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah".

3) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari beberapa sumber pendapatan. Yang pertama Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2007: 96) pendapatan asli

daerah merupakan semua penerimaan daerah yangberasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-undang no 33 tahun 2004 pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan menghasilkan sumber sumber pendapatan yang ada di daerahnya. Peningkatan PAD ini menjadi sangat penting dalam era otonomi daerah, karena kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Halim 2007)

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 1) pajak adalah iuran rakyak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayarpengeluaran umum.

Berdasarkan diatas pajak ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang dan juga pembayar pajak tidak dapat mendapatkan timbal balik secara langsung atas pihak yang telah dibayarkan. Kewenangan pemerintah dalam memungut pajak pada masyarakat sesuai dengan pengertian pajak daerah dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah yang mengatakan, kontribusi yang wajib kepada daerah yang

terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak sesuai dengan ketetapan sesuai dengan UU no 28 tahun 2009 pasal 2. Jenis-jenis pajak daerahnya yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :
    a. Pajak Kendaraan Bermotor
    b. Bee Balik Nama Kendaraan Bermotor
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
    d. Pajak Air Permukaan
    e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak reklame
    e. Pajak Penerangan Jalan
    f. Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan
    g. Pajak Parkir
    h. Pajar Air Tanah
    i. Pajak Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lainnya dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Bila pajak daerah tidak ada hubungan timbal balik secara langsung terhadap pembayar pajak, maka retribusi daerah ini secara langsung berhubungan dengan pembayar pajaknya. Hal ini sejalan dengan pengertian retibusi daerah dalam undang-undang no 28 tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan".

Pendapatan retribusi daerah ini erat kaitannya dengan banyaknya pelayanan pemerintah dengan masyarakat dan juga tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena semakin banyak pelayanan yang diberikan akan semakin banyak pembayaran retribusi daerah.

3. Hasil Pengolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba perusahaan daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba atas penyetoran modal/investasi kepada pihak ketiga.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan dinas pertanian tanaman pangan, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan gantii rugi atas kekayaan daerah, penerimaan lainnya.

4) Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerahdalam program otonom daerah ini tentunya meningkatkan tanggung jawab pengolahan program kepada pemerintah daerah, program kerja sebelumnya ada dalam kebijakan pemerintah pusat, kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program kerja yang meningkat tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proposional maka diterbitkan undang – undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan penyempurnaan undang – undang no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Merujuk pada pengertian dana perimbangan dalam undang-undang no 33 tahun 2014 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dana perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Peningkatan kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam era otonomi ini memang seharusnya diatasi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi, kebanyakan daerah memiliki tingat kemandirian keuangan daerah yang rendah sehingga mengandalkan dan perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan lahir dana perimbangan yang berdasarkan peraturan pemerintah no 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, menyatakan bahwa tujuan dana perimbangan adalah untung membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pandangan teori ekonomi politik, fungsi ekonomi pemerintah terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi distribusi dan fingsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila kewenanganya berada pada pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat jika pelaksanaanya ada pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di daerahnya. Maka dari itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Perincian pendapatan yang termasuk kealam dana perimbangan terdapat undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil

Menurut undang-undang no 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angga presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaaan alam yang sudah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil inijuga didapat dari bagi hasil pajak.

Penerimaan pajak yang termasuk dalam komponen pendapatan bagi hasil sesuai dengan undang-undang no 33 tahun 2004 adalah :

a. Penerimaan Pajak

(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90%

untuk daerah. Dana bagi hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud diatas digai dengan rincian sebagai berikut:

(a). 16,2 % untuk daerah propinsi yang bersangkutan

(b). 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan

(c). 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan bagian pemerintah pusat sebagaimana pembagian diatas dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut :

(a). 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota

(b). 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan atau kota yang direalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaaan dan perkotaan sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

(2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah 80% untuk daerah. DBH DPHTB untuk daerah 80% dibagi untuk daerah dengan rincian

(a). 16% untuk propinsi yang bersangkutan

(b). 64% untuk daerah atau kota yang bersangkutan

Selanjutnya bagian pemerntah 20% dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota

(3) Pajak penghasilan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 yang merupakan bagian dari daerahadalah sebesar 20% dengan rincian

(a). 60% untuk daerah dan kota

(b). 40% untuk propinsi

b. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

1. Sektor Kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dibagi imbalan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% untuk pemerintah dan $0% untuk daerah.

2. Sektor Pertambangan Umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

3. Sektor Pertambangan Minyak Bumi

   Penerimaan sektor pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

4. Sektor Pertambangan Gas Bumi

   Penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah.

5. Sektor Perikanan

   Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah dan *0% untuk daerah.

6. Sektor Pertambangan Panas Bumi

   Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara

bukan pajak, dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

2. Dana Alokasi Umum

Menurut undang-undang no 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya dana alokasi umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang merata antar daerah. Bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah tentunya akan tertinggal dibanding daerah yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Karenanya dana alokasi umum ini hadir untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sesuai dengan amanah konstitusi.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran dana alokasi umum ini, pemerintah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri no 26 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa dana alokasi umum agar di prioritaskan penggunaanya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta

pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

Pengalokasian dana alokasi umum kepada setiap daerah ini ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskalsatu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Dana alokasi umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal tadi akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat kepada rekening kas pemerintah daerah. Kontribusi dana alokasi umum ini masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proposi DAU terhadap pendapatan daerah masih tinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk penerimaan pendapatan asli daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan asli daerah berdasarkan UU no 33 tahun 2004. Berdasarkan undang-undang tersebut, dana alokasi khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

Dana alokasi khusus ini dialokasikan untuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah debanding kemampuan fiskal daerah secara nasional. Penentuan penerimaan dana alokasi khusus ini diatur

sesuai dengan kriteria penerimaan DAK yang terdapat dalam undang-undang. Sesuai dengan pengertiannya, dan alokasi khusus ini dialokasikan untuk mendanai kebutuhan program pemerintah daerah yang sejalan dengan kepentingan program nasional, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

5) Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja daerah yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini. Tentunya belanja modal harus sangat disesuaikan dengan kebutuhandaerah agar kelakaset tetap yang bertambah tersebut tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proposional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.

Mardiasmo (2002) dalam Andria (2009) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus mendekatkan diri kepada

pelayanan dasar publik dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini tentunya dengan memberikan porsi belanja modal yang maksimal. Peningkatan pelayanan publik ini sebenarnya akan semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah dalam memenuhi indikator keberhasilan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah memenuhi kebutuhan belanjanya.

Belanja modal yang digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan sarana transportasi tetntunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan pembangunan fasilitas ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah. Maka dari itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsinya lebih banyak untuk kebutuhan belanja rutin. Menurut undang-undang no 32 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan

perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan,penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta iventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bnagunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud sudah siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, pergantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan tersebut sudah dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Fisik dan Lainnya

Belanja modal fisik dan lainnya adalah pengeluaran atau biaya untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dapat dikatagorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa dan beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

C. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dan Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Peningkatan ini tentunya sejalan dengan meningkatnya beban pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bila sebelumnya pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang dimana semua program pemerintahan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Maka saat ini sebagian besar kewenangan dalam merencanakan program sampai dengan pelaksanaanya ada pada pemerintah daerah. Maka daeri pda itu satu sisi kebijakan ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam membuat progam yang paling sesuai dengan kondisi daerahnya. Disisi lain otonomi ini menjadi tantangan atau

bahkanpeningkatan beban bagi pemerintah daerah karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan matang bagi pemerintah daerahnya.

Sejalan dengan peningkatan wewenang pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintah, pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya untuk bisa membianyai kebutuhan belanja daerah secara mandiri. Karena salah satu dari tujuan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.

Realitas yang ada dalam menunjukan bahwa tingkat kemandirian pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja daerah yang paling tinggi sebesar 20%. Maka dari itu pemerintah pusat tidak melepas tangan begitu saja dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah ini. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan transfer dana pada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan mampu membianyai belanja pemerintah daerah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pemerintah daerahnya.

Berkaitan dengan belanja daerah yang ditujukan untuk meningkatakan pelayanan publik dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ini, strategi alokasi belanja daerah menjadi penting untuk diperhatikan agar dapat berperan maksimal dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan asli daerah. Agar kontribusi publik terhadap pendapatan daerah meningkat, hendaknya alokasi belanja modal yang merupakan bagian belanja daerah yang ditingkatkan. Peningkatan belanja modal dalam pembangunan dan perbaikan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat bias langsung merasakan dampak dari pembangunan ini. Peningkatan pembangunan prasarana tersebut tentu akan meningkatkan aktifitas usaha masyarakat daerah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Apabila Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembelanjaan daerah mengalami peningkatan, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk alokasi belanja akan ikut meningkat, peningkatan itu diiringi peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Yang menjadi sumber anggaran darah selain pendapatan asli daerah adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sehingga dana perimbangan ini memiliki keterkaitan dengan belanja daerah. Abdul dan halim (2003) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panajang transfer pemerintah pusat bepengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah tranfer dapat menyebabkan penurunan belanja modal.

D. Hipotesis

a. Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

b. Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

c. Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

E. Kerangka Teori

Gambar II.1
Kerangka Teori

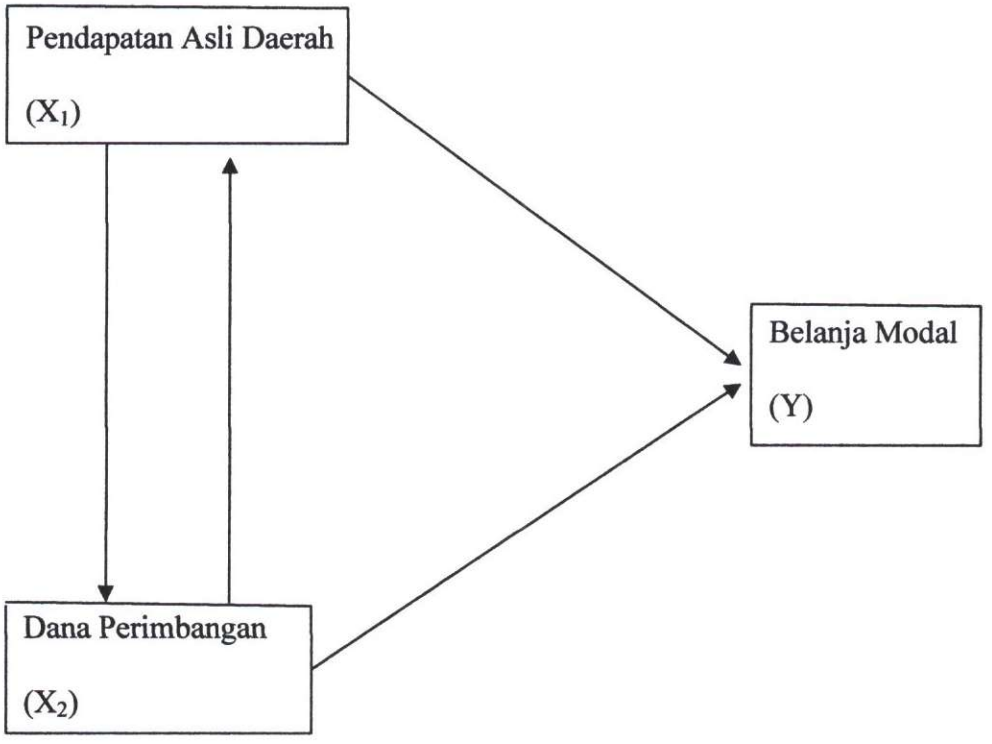

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2009 : 55-53), jenis penelitian tingkat eksplanasinya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komperatif

   Penelitian Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabel nya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam wakt yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui web www.djpk.kemenkeu.go.id

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.	Total Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan (X_2)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Total Dana Perimbangan
Belanja Modal (Y)	Merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditatapkan pemerintah.	Total Belanja Modal

Sumber : Penulis, 2017

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota provinsi sumatera selatan. Terdapat 12 kecamatan dan 4 kota di provinsi sumatera selatan.

Tabel III.2
16 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan	Ibukota Kabuapten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan
1. Kabupaten Lahat	Ibukota Lahat
2. Kabpaten Musi Banyu Asin	Ibukota Sekayu
3. Kabupaten Musi Rawas	Ibukota Muara Beliti
4. Kabupaten Muara Enim	Ibukota Muara Enim
5. Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ibukota Kayu Agung
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu	Ibukota Baturaja
7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Ibukota Martapura
8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Ibukota Muara Dua
9. Kabupaten Ogan Ilir	Ibukota Indralaya
10. Kabupaten Banyu Asin	Ibukota Pangkalan Balai
11. Kabupaten Empat Lawang	Ibukota Tebing Tinggi
12. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI)	Ibukota Talang Ubi
13. Kota Palembang	Ibukota Palembang
14. Kota Pagar Alam	Ibukota Pagar Alam
15. Kota Lubuk Linggau	Ibukota Lubuk Linggau
16. Kota Prabumulih	Ibukota Prabumulih

Sumber : penulis, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya kabupaten dan kota di provinsi sumatera selatan diatas maka penulis ingin mengambil data ABPD dari ke 16 kota dan kabupaten di proovinsi sumatera selatan.

E. Data yang Diperlukan

Nur dan Bambang (2009: 146-147), data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data Primer

   Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui prantara)

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung/melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dari artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya serta APBD Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 – 2015.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angkat)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan datayang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain. Penulis melakukan metode dokumentasi yaitu metode yang mengambil data secara langsung ke tempat yang ingin diteliti dan dibantu juga dengan jurnal – jurnal penelitian sebelumnya.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

   Sugiyono (2009: 13-14), menyatakan ada dua jenis metode analisi yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

   a) Analisis Kualitatif

      Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuisioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat.

2. Teknik Analisis

a) Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan P-P plot test. Pengujian normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

(2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Faktor (VIF). Menurut model ini suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas apabilamempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

(3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Ghozali (2005:95) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi sering terjadi pada sample dengan data *time series*. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dapat dilakukan dengan metode grafik dan uji Durbin-Watson. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif

(4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang di prediksi dan sumbu Y adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

b) Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja daerah di Kota Palembang, penulis menggunakan metode analisis regresi ganda. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel

bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y= a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Y = Belanja Modal

a = harga Y ketika X=0 (harga Konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang didasarkan penurunan perubahan variabel independen

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Perimbangan

c) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai koefisen determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

d) Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

Uji F merupakan pengujian secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel.

Apabila nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, maka variabel bebas bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas. Kesimpulan ini juga dapat dilihat dari nilai signifikan F-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi dari pada tingkat keyakinan (α = 0,05) maka seluruh variabel independen tidak punya pengaruh yang signifikan secar bersama-sama terhadap variabel dependennya., begitupun sebaliknya. Bila signifikansinya lebih kecil dari pada tingkat keyakinan (α = 0,05) maka seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependennya.

H_a : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal diterima.

H_o : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak.

2. Pengujian Hipotesis Secara Individual (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai t-statistik dengan nilai t-tabel. Apabila nilai t-statistik lebih besar dari nilai t-tabel, maka variabel bebas tersebut secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas. Kesimpulan ini juga dapat dilihat dari nilai signifikasi t-

statistik atau t-hitung. Bila signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat keyakinan (α = 0,05) maka variabel tersebut tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya, begitu pula sebaliknya. Bila signifikasinya lebih kecil (α = 0.05) maka variabel tersebut punya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Tingkat signifikasi 0,05 artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probalitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

H_a : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_o : Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_a : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

H_o : Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Sejarah Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera. Provinsi ini beribukota di Palembang. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu ibukota provinsi Sumatera Selatan, Palembang telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya.

Disamping itu, Provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk di kunjungi seperti Sungai Musi, Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Gunung Dempo, Bukit Jempol dan lain – lain. Karena sejak dulu sudah menjadi pusat perdagangan, secara tidak langsung ikut mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas dari Provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jokjok, berengas dan tempoyak.

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad – abad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya pada abad ke-7 hingga abad ke-12 masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga dikenal

dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika.

Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada dibawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari mancanegara terutama dari negeri China. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Menurut Prasasti Kedudukan Bukit yang ditemukan pada tahun 1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu didirikan pada tangga; 17 jini 683 masehi. Tanggal tersebut kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperingati setiap tahunnya.

b. Visi dan Misi

1. Visi :

Sumatera Selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing Internasional.

2. Misi :

Memantau dan mengawal Program Berobat Gratis, Sekolah Gratis dan segera terwujudnya Kuliah Gratis pada 2015 untuk

warga Sumatera Selatan, dan mendorong untuk bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia (dari Sumatera Selatan untuk Indonesia).

d. Tugas dan Fungsi

a. Tugas :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kota / Kabupaten dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kota / Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Perencanaan Program pengawasan.
2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

a. Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km^2. Batas – batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai timur tanahnya terdiri dari rawa – rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin kebarat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukit barisan yang membelah sumatera selatan dan merupakan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 – 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125 m). Di sebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai – sungai itu bermata air dari bukit barisan, kecuali sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selatan Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan

Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang< Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai Ibukota Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten dan 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti dengan Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 kontribusi masing – masing di atas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%.

Sebagai salah satu Provinsi tujuan investasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya adalah Bandara S.M. Badarudin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Tnjung Enim di kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan

Palembang yang terletak di Kota Palembang juga Pelabuhan Khusu Kertapati di Kabupaten Muara Enim.

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada dibawah kekuasaan Majapahit, selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut di mancanegara terutama dari negeri China. Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, Kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota akerajaan.

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 12 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan {emerintah Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut :

1. Kabupaten Lahat (Ibukota Lahat)
2. Kabupaten Musi Banyuasin (Ibukota Sekayu)

3. Kabupaten Musi Rawas (Ibukota Muara Beliti)
4. Kabupaten Muara Enim (Ibukota Muara Enim)
5. Kabupaten Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung)
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja)
7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Ibukota Martapura)
8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Ibukota Muara Dua)
9. Kabupaten Ogan Ilir (Ibukota Indralaya)
10. Kabupaten Banyu Asin (Ibukota Pangkalan Balai)
11. Kabupaten Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi)
12. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (Ibukota Talang Ubi)
13. Kota Palembang (Ibukota Palembang)
14. Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam)
15. Kota Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau)
16. Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih)

Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Induk Muara Enim dengan Undang – Undang No 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir.

c. Data

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di

Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, di peroleh data sebagai berikut :

1) **Analisis Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi sumatra Selatan**

Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal yang menjadi bagian dari semangat program desentralisasi. Kemandirian fiskal ini diartikan sebagai semangat dalam membangun daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dang mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Berikut adalah data pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.I
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatra Selatan
Tahun Anggaran 2013 – 2015

(dalam jutaan rupiah)

Kota dan Kabupaten	Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013	Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014	Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015
Kabupaten Ogan Komering Ulu	42.869	68.959	106.821
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	30.864	36.918	53.258
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	13.444	21.360	39.355
Kabupaten Ogan Komering Ilir	54.165	62.449	138.653
Kabupaten Muara	101.100	133.627	141.775

Enim			
Kabupaten Lahat	62.156	79.066	92.074
Kabupaten Musi Rawas	90.319	81.732	100.031
Kabupaten Musi Banyu Asin	105.766	129.225	209.787
Kabupaten Empat Lawang	16.603	20.000	25.840
Kabupaten Ogan Ilir	63.895	95.980	52.411
Kota Palembang	509.788	684.480	773.614
Kota Pagar Alam	26.170	34.180	35.765
Kota Lubuk Linggau	37.860	51.603	66.299
Kota Prabumulih	33.864	51.875	78.442
Kabupaten PALI		21.215	18.479

Sumber : laporan APBD 16 Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

2) Analisis Dana Perimbangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan

Dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah ini memiliki peranan yang dominan dalam memenuhi kebutuhan belanja pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Sumatra Selatan. Kebutuhan pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan roda pemerintahannya masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Berikut adalah data dana perimbangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan
Tahun Anggaran 2009 – 2014

(dalam jutaan rupiah)

Kota dan Kabupaten	Total Dana Perimbangan Tahun 2013	Total Dana Perimbangan Tahun 2014	Total Dana Perimbangan Tahun 2015
Kabupaten Ogan Komering Ulu	814.038	861.581	872.324
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	883.951	960.277	947.419
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	659.438	761.668	778.810
Kabupaten Ogan Komering Ilir	1.199.455	1.251.107	1.298.711
Kabupaten Muara Enim	1.305.802	1.406.867	1.402.507
Kabupaten Lahat	1.001.865	1.068148	1.092.507
Kabupaten Musi Rawas	1.308.652	882.138	1.087.676
Kabupaten Musi Banyu Asin	2.452.572	3.289.966	2.096.515
Kabupaten Empat Lawang	565.240	651.895	761.039
Kabupaten Ogan Ilir	819.828	1.050.426	990.914
Kota Palembang	1.474.281	1.575.059	1.500.049
Kota Pagar Alam	501.227	585.509	583.668
Kota Lubuk Linggau	534.839	693.789	719.869
Kota Prabumulih	562.740	641.211	715.176
Kabupaten PALI		271.029	651.176

Sumber : laporan APBD 16 Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

3) Analisis Belanja Modal Di Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatra Selatan

Kebutuhan pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya diperlihatkan dalam pos belanja dalam APBD. Salah satu pos belanja yang menjadi sorotan adalah pos belanja modal. Belanja modal ini berkaitan dengan peningkatan fasilitas

pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur dan juga hal lainnya yang memiliki manfaat 1 tahun anggaran. Nilai belanja modal pemerintah kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Belanja modal pemerintah sumatra selatan
Tahun anggaran 2013 – 2015

(dalam jutaan rupiah)

Kota dan Kabupaten	Total Belanja Modal Tahun 2013	Total Belanja Modal Tahun 2014	Total Belanja Modal Tahun 2015
Kabupaten Ogan Komering Ulu	348.604	309.511	250.582
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	235.271	252.350	211.508
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	278.239	315.134	357.165
Kabupaten Ogan Komering Ilir	500.874	441.154	467.194
Kabupaten Muara Enim	473.779	6.49.156	510.984
Kabupaten Lahat	226.725	255.315	270.088
Kabupaten Musi Rawas	588.981	458.834	446.461
Kabupaten Musi Banyu Asin	1.242.614	1.497.263	639.258
Kabupaten Empat Lawang	251.425	289.706	342.383
Kabupaten Ogan Ilir	410.547	475.242	351.274
Kota Palembang	532.626	668.034	606.555
Kota Pagar Alam	164.911	202.494	212.874
Kota Lubuk Linggau	172.037	390.058	266.742
Kota Prabumulih	191.573	255.722	282.464
Kabupaten PALI		141.041	369.170

Sumber : laporan APBD 16 Pemerintah Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

a. Uji Asumsi Klasik

(1) Uji Normalis

Uji normalis bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis grafik dapat digunakan dengan dua alat yaitu grafik histogram dan grafik P-P Plot. Data yang baik adalah data yang memiliki pola distribusi normal. Pada grafik P-P Plot, sebuah data yang dikatakan berdistribusi normal apabila titik – titik datanya tidak melenceng ke kiri atau kekanan melainkan menyebar di sekitar garis diagonal.

Gambar IV.1

Uji Normalitas

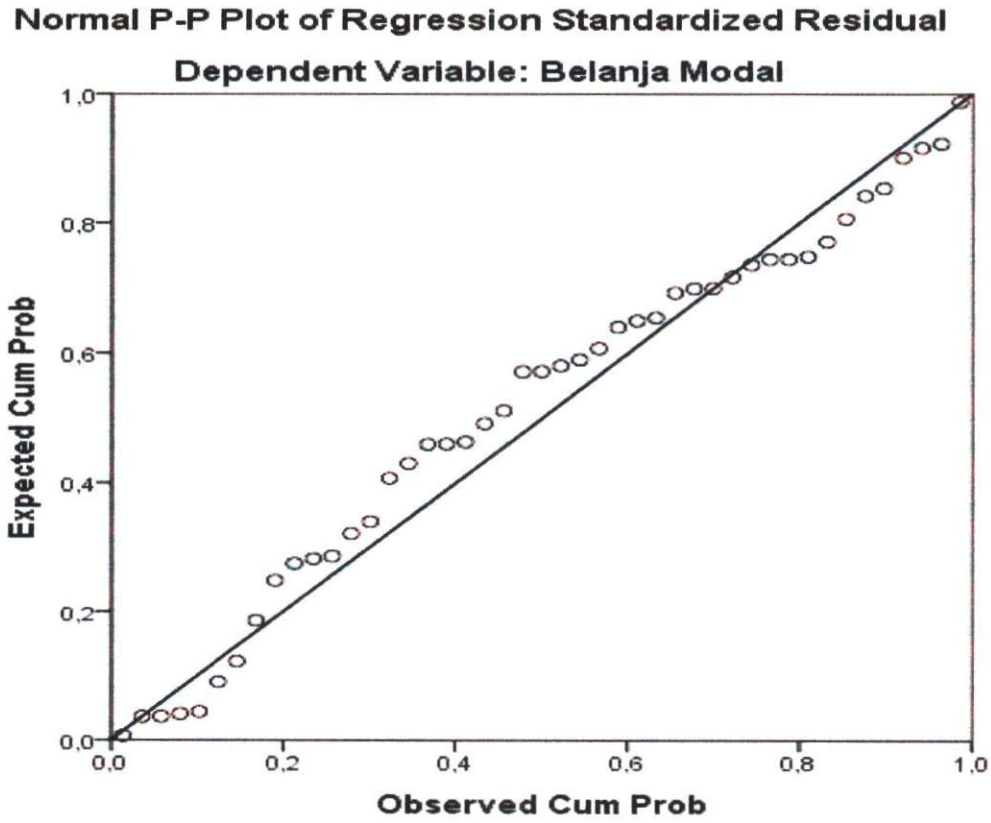

Sumber : *Data Yang Diolah,* 2017

Hasil pada tabel di atas menunjukkan titik – titik menyebar dan mengikuti garis diagonal, hal ini berarti menunjukan bahwa data penelitian tersebut berdistribusi normal.

(2) Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali 2005;91 regresi yang baik seharusnya tidak terjadikorelasi diantara variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat Tolerance Value dan Variance Inflation Faktor (VIF). Menurut model ini suatu model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas apabilamempunyai nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berikut tabel hasil pengujian :

Tabel IV.4
Uji Multikolinearitas
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,465	,945		-1,617	,113		
Pendapatan Asli Daerah	-,062	,098	-,037	-,629	,532	,822	1,217
Dana Perimbangan	,443	,028	,953	16,103	,000	,822	1,217

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Data Yang Diolah*, 2017

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan nilai *tolerance* masing – masing variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) 0,822, variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0,822, lebih kecil dari 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

(3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Ghozali (2005:95) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi sering terjadi pada sample dengan data *time series*. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu :

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W diatas +2 berarti autokorelasi negatif

Untuk mendeteksi ini dapat dilakukan dengan pengujian D-W yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,938[a]	,879	,873	,59157	2,039

'redictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah
)ependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Data Yang Diolah*, 2017

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai DW sebesar 2,039 jika dibandingkan dengan nilai tabel DW, dengan nilai signifikasi 5%. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai DW berada antara -2 dan +2.

(4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik scatterplot antara nilai variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), dimana sumbu X adalah yang di prediksi dan sumbu Y adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.2
Uji Heteroskedastisitas

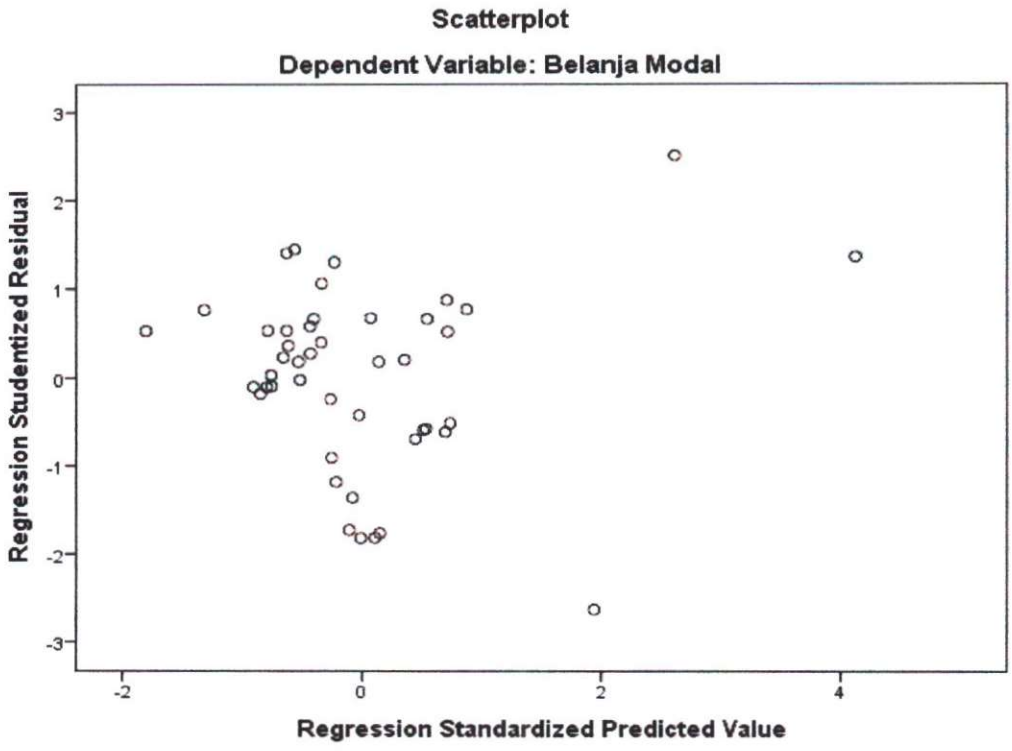

Sumber : *Data Yang Diolah*, 2017

Berdasarkan gambar diatas , antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil dengan adanya pola dan titik – titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan terjadi heterokedastisitas.

b. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing – masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Setelah melakukan regresi dengan SPSS maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,465	,945		-1,617	,113
Pendapatan Asli Daerah	-,062	,098	-,037	-,629	,532
Dana Perimbangan	,443	,028	,953	16,103	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

sumber : *Data yang Diolah*, 2017

berdasarkan tabel diatas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = - 0{,}465 - 0{,}062_{x1} + 0{,}443_{x2}$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut menggambarkan bahwa :

2) Nilai konstanta sebesar 0,465 ini menunjukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), dan Dana Perimbangan (X_2) adalah 0, maka Belanja Modal adalah 0,465.
3) Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 0,062 menyatakan bahwa peningkatan/penurunan Pendapatan Asli

Daerah maka akan di ikuti peningkatan/penurunan Belanja Modal sebesar 0,062.

4) Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X_2) sebesar 0,443 menyatakan bahwa peningkatan/penurunan Dana Perimbangan maka akan diikuti peningkatan/penurunan Belanja Modal sebesar 0,443.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2011). Nilai koefisen determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel IV.7
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,938[a]	,879	,873	92907979986 ,59157	2,039

[a] redictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah
[b] ependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Data Yang Diolah*, 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukan nilai koefisien (R Square) sebesar 0,879 yang berarti hubungan antara pengalokasian Belanja Modal dengan variabel independennyayaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sangat erat.

d. Uji Hipotesis

1). Uji Hipotesis Secara Simultan (F)

Untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji F, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.8
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	2	,000	152,789	,000[b]
	Residual	,000	42	,000		
	Total	,000	44			

)ependent Variable: Belanja Modal
'redictors: (Constant), Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

Sumber : *Data Yang Diolah*,2017

Berdasarkan hasil uji F diatas diketahui nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), sebesar 0,000. Dimana 0,000 < daripada 0,05 yang menyatakan hipotesis H_0 ditolak dan H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, berpengaruh terhadap Belanja Modal.

2). Uji Hipotesis Secara Parsial (uji t)

Untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana Pendapatan Asli Daerah (X_1), atau Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.9
Hasil Uji t
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,465	,945		-1,617	,113		
Pendapatan Asli Daerah	-,062	,098	-,037	-,629	,532	,822	1,217
Dana Perimbangan	,443	,028	,953	16,103	,000	,822	1,217

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : *Data Yang Diolah*, 2017

Pengujian koefisien variabel Pendapatan Asli daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dilakukan melalui tahapan – tahapan berikut :

a. Pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji hipotesis berdasarkan tabel IV.10 menunjukan nilai signifikan sebesar 0,532 dimana 0,532 < 0,05 yang menyatakan hipotesis H_o (Pendaptan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap

Belanja Modal) ditolak dan H_a (Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal) diterima. Maka dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

b. Pengujian variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan

Hasil uji hipotesis menunjukan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 yang menyatakan H_o (Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal) ditolak dan H_a (Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal) diterima. Maka kesimpulannya Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Ppendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Selatan secara Simultan

Berdasarkan hasil penelitian, nilai dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 sampai 2015 berbeda – beda, dan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.Hasil ini dibuktikan pada Uji F.

Hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul adalah sebesar **0,000**. Berdasarkan kriteria pengujian, karena nilai **sig F < 0,05 (0,000 < 0,05)** yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti laba atau profit tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang di salurkan serta keberhasilan Pemerintah Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya untuk mengembangkan Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini terdapat keselarasan dan sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Ariv Cahyono (2010), hasil penelitiannya menunjukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian dari Maria Reka Novianti (2013) menunjukan bahwa secara simultan menunjukan secara simultan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bandung.

2. **Pengaruh Pendaptan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan secara Parsial**

Nilai dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 sampai 2015 berbeda – beda, dan hasil

dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal begitu juga denga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal secara parsial. Hasil ini dibuktikan pada Uji t.

Hasil uji hipotesis menunjukan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 yang menyatakan H_o (Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal) ditolak dan H_a (Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal) diterima. Maka kesimpulannya Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini tidak terdapat keselarasan dan tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Ariv Cahyono (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Reka Novianti (2013), dimana hasil penelitiannya tentang Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bandung.

Nilai dari total keseluruhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013 sampai 2015 berbeda – beda, dan hasil dari penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal begitu juga dengan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal secara parsial. Hasil ini dibuktikan pada Uji t.

Hasil uji hipotesis menunjukan nilai signifikan sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 yang menyatakan H_o (Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal) ditolak dan H_a (Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal) diterima. Maka kesimpulannya Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini tidak terdapat keselarasan dan tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Ariv Cahyono (2010), dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Demikian juga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maria Reka Novianti (2013), dimana hasil penelitiannya tentang Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Bandung.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka saran yang bisa diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk semakin menggali potensi PAD yang ada sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar lebih menambah Kabupaten/Kota lebih teliti lagi, sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat, selain itu penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil data Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatra Selatan. Ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku juga untuk Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatra Selatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel – variabel yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Ariv Cahyono. 2010. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal (StudiKasus Di Kota Yogyakarta).* Skripsi Tidak Diterbitkan.

Cherrya Dhia. 2012. *Analisi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.* Skripsi Tidak Diterbitkan.

Ghozali. 2005. *Aplikasi analisis multivariate dengan Program SPSS.* Edisi Ketiga. Semarang : Universitas Diponogoro.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : CV Andi Offset

Maria Reka Novianti. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Pemerintahan Kota Bandung.* Skripsi Tidak Diterbitkan.

M Nafarin.2004. *Pengarang Perusahaan.* Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomi. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Sugiyono. 2009. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi.* FE-UMP, Pedoman tidak dipublikasikan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /Sm / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dp I-III/VII/ 2015 (B)

Email : febumplg@umpalembang.ac.id
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Abel Rinaldi
Nim : 222011323
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KOTA DAN KABUPATEN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	24-3-2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	24-3-2017	
3	Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji I	22/3 - 2017	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	20/3/2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Jln. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 – 513022 Fax. 0711 - 513078

Nomor : 68 /R-62/GI.BEI UMP/II/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Palembang, 13 Jumadil Awal 1438 H
10 Februari 2017 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Ba'da salam semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa mahasiswa di bawah ini dengan:

Nama : Abel Rinaldi
NIM : 22 2011 323
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan pengambilan data di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan diketahui oleh pojok Bursa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wasalamu'alaikum, wr, wb.

Mengetahui,
Ketua Galeri Investasi BEI UMP

Ervita Safitri, S.E., M.Si.
NIDN : 0225126801

Email : GIUMPalembang@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: **Abel Rinaldi**	PEMBIMBING	:
NIM	: **22 2011 323**	KETUA	: **Drs. Sunardi, S.E, M.Si**
PROGRAM STUDI	: **Akuntansi**	ANGGOTA	:
JUDUL SKRIPSI	: **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan**		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	27-1-2017	Bab I. II III			Revisi
2.	29-1-2017	Bab I. II. III			Revisi
3.	2-2-2017	Bab IV			Revisi
4.	7-2-2017	Bab IV			Revisi
5.	9-2-2017	Bab IV			Revisi
6.	10-2-2017	Bab IV. V			ACC
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /
a.n Dekan
Ketua Program Studi

Heri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**ABEL RINALDI**
NIM	:	**222011323**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 31/٢٠١٥/ديسمبر
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Abel Rinaldi
Place/Date of Birth	:	Lahat, November 20th 1991
Test Times Taken	:	+3
Test Date	:	December 26th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension	:	50
Structure Grammar	:	40
Reading Comprehension	:	46
OVERALL SCORE	:	453

Palembang, December 28th, 2015
Head of Language Institute

LEMBAGA BAHASA
Univ. Muhammadiyah Palembang

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. **1164932/0210098402**

No. 802/TEA FE/LB/UMP/XII/2015

123 certificates

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: ABEL RINALDI
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222011323
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: LAHAT, 20-11-1991

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Mariana
Kecamatan	: Banyuasin I
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui
Rektor,

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama	: Abel Rinaldi
NIM	: 22 2011 323
Tempat/Tanggal Lahir	: Lahat, 20 November 1991
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Alamat	: Grya Perumnas Selawi Indah Jl. Albasyah III Blok C No 19
No. Handphone	: 0822-6160-3031
Email	: abel.rinaldi@yahoo.com
Nama Orang Tua	
Bapak	: Marfin Effendi
Ibu	: Lainah
Pekerjaan Orang Tua	
Bapak	: PNS
Ibu	: PNS
Alamat Orang Tua	: Grya Perumnas Selawi Indah Jl. Albasyah III Blok C No 19, Lahat

Palembang, 31 MARET 2017

Penulis,

(Abel Rinaldi)